ANALISIS SEGITIGA KEKERASAN DALAM DISKRIMINASI PENGUNGSI KOREA UTARA DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN 2019-2020

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DINDA REGINA PUTRI

20323107

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

ANALISIS SEGITIGA KEKERASAN DALAM DISKRIMINASI PENGUNGSI KOREA UTARA DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE IN 2019-2020
SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

DINDA REGINA PUTRI

20323107

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Segitiga Kekerasan Dalam Diskriminasi Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In 2019-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

7 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
2	Mohamad Rezky Utama,S.IP., M.Si.	
3	Hangga Fathana,S.IP., B.Int.St., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

9 Juli 2024



Dinda Regina Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....iv
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR TABEL.....vii
DAFTAR GAMBAR.....viii
ABSTRAK.....ix
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan masalah.....4
1.3 Tujuan Penelitian.....4
1.4 Cakupan Penelitian.....5
1.5 Tinjauan Pustaka.....6
1.6 Kerangka Pemikiran.....8
1.7 Argumen Sementara.....11
1.8 Metode Penelitian.....12
1.8.1 Jenis Penelitian.....*12*
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....*13*
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....*14*
1.8.4 Proses Penelitian.....*14*
1.9 Sistematika Pembahasan.....15
BAB II.....16
DISKRIMINASI PENGUNGSI KOREA UTARA di KOREA SELATAN DILIHAT DARI KEKERASAN KULTURAL.....16
2.1 Kekerasan kultural Aspek Ideologi.....17
2.2 Kekerasan kultural Aspek Bahasa.....24
BAB III.....31
DISKRIMINASI PENGUNGSI KOREA UTARA DI KOREA SELATAN MELIHAT DALAM KEKERASAN STRUKTURAL.....31
3.1 Kekerasan struktural Pada Kebutuhan Bertahan Hidup (Eksploitas A) dan Kebutuhan Kesejahteraan (Ekploitasi B).....33
3.2 Kekerasan Langsung Terlukanya Kebutuhan Kesejahteraan (Penderitaan).....38

3.4 Kekerasan Langsung Pada Kebutuhan Bertahan Hidup Pengungsi Korea Utara..... 43
3.5 Kekerasan langsung Pada kebutuhan Kemerdekaan (Represi)..... 47
BAB IV..... 50
PENUTUP..... 50
4.1 Kesimpulan..... 50
4.2 Rekomendasi..... 56
DAFTAR PUSTAKA..... 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tipologi Kekerasan 9
Tabel 2 : Perbandingan Aksen 23
Tabel 3 : Tipologi Kekerasan Galtung 28
Tabel 4 : Tipologi Kekerasan Struktural 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Segitiga Kekerasan Galtung 9
Gambar 2: Hasil Analisis Bentuk Segitiga Galtung 54

ABSTRAK

Dilema permasalahan pada suatu migran merupakan salah satu isu yang menjadi bagian komponen Korea Selatan karena Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan tingginya sikap anarkis dan homogenitas identitasnya. Perkembangan Korea Selatan sebagai negara yang cepat dalam mengikuti modernisasi sehingga hal itu mempengaruhi perubahan tatanan yang ada di Korea Selatan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk segitiga kekerasan oleh Johan Galtung pada masa pemerintahan Moon Jae-in di (2019-2020). Menggunakan konsep segitiga kekerasan yang dibawa Johan Galtung pada untuk meninjau bentuk kekerasan pada diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan yaitu kekerasan langsung,kekerasan struktural,kekerasan kultural. Hasil penelitian ini adalah sebuah konsep segitiga kekerasan menurut Johan Galtung berhasil menjawab rumusan masalah terkait bentuk kekerasan yang terjadi pada pengungsi Korea Utara di Korea Selatan karena homogenitas dan prasangka buruk yang masih tinggi pada masyarakat Korea Selatan, Hal ini menjadikan pengungsi mengalami tekanan sosial terutama saat berada pada pemukiman kembali.

Kata Kunci : Segitiga Kekerasan, Pengungsi Korea Utara, Diskriminasi, Pemerintahan Moon Jae-In.

ABSTRACT

The dilemma of migrant problems is one of the issues that is a component of South Korea because South Korea is known as a country with a high level of anarchic attitudes and a homogeneous identity. South Korea's development as a country is rapidly following modernization so that this influences changes in the existing order in South Korea. The research aims to analyze the triangular form of violence by Johan Galtung during Moon Jae-in's reign (2019-2020). Using the concept of the triangle of violence brought by Johan Galtung to review the forms of violence in discrimination against North Korean refugees in South Korea, namely direct violence, structural violence and cultural violence. The result of this research is that a concept of the triangle of violence according to Johan Galtung has succeeded in answering the problem formulation related to the forms of violence that occur among North Korean refugees in South Korea because of the homogeneity and prejudice that is still high in South Korean society. This causes refugees to experience social pressure, especially when they are in resettlement.

Keywords : Violence Triangle,North Korean Refugees,Discrimination,Moon Jae-In Government.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Perang Semenanjung Korea menjadikan wilayah tersebut berada pada dua kubu yang berbeda. Masyarakat yang terdampak tinggal secara paksa pada wilayah yang ditinggali, sehingga banyak juga dari mereka yang terpisah dari keluarga masing-masing. Korea Utara sebagai negara dengan sistem komunis, Atas pemerintahan yang otoriter seringkali berada pada pelanggaran hak asasi manusia di mata internasional. sehingga warga negara Korea Utara berada pada ruang kebebasan yang tidak kompleks, selain itu sistem hukum peradilan yang tidak sesuai yang menciptakan level sosial antara warga negara. Hal ini menjadikan Korea Utara selalu dikelilingi problematika sosial serta perekonomian yang tidak stabil. Korea Utara dengan sistem pemerintahan yang komunis memberikan warga negaranya kesulitan dalam memenuhi kesejahteraan, dan sering kali dianggap melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Kurangnya ruang kebebasan serta memberikan hukuman pada setiap warga negaranya secara tidak manusiawi, bahkan warga Korea Utara didapati pada masalah kelaparan setiap harinya. sehingga faktor-faktor tersebut yang menyebabkan warga negara Korea Utara sampai melarikan diri dan meninggalkan negaranya (Vinesha Anindita, 2020).

Bagi Korea Utara sendiri warga negara yang melarikan diri ditetapkan pada hukuman mati, warga negara yang melarikan diri sering melalui jalur wilayah China dan Jepang Bahkan jika mereka berhasil, akan menetap di negara Korea Selatan sebagai negara yang juga melegalitaskan penerimaan

pengungsi dari negara Korea Utara sendiri. Penerimaan pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan diimplementasikan pertama kalinya pada masa pemerintahan Park Chung Hee 1962, sebuah kebijakan tersebut masuk dan diatur pada *Special Law On The Protection Of Defectors From The North.* Korea Selatan sebagai negara yang menjadi tujuan utama pengungsi melarikan diri dengan penjaminan penerimaan di negara Korea Selatan dimana bebas pada lingkungan yang represif baik itu pada perekonomian maupun kebebasan dalam politik tidak menjadikan hal tersebut bahwa pengungsi Korea Utara terbebas pada tantangan tambahan setelah mereka memutuskan untuk menetap di wilayah Korea Selatan (Andrei Lankov 2006).

Di Korea Selatan sebagai negara demokratis tidak membawa pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan terlepas pada permasalahan diskriminasi. dengan masalah diskriminasi pada pengungsi Korea Utara terlihat pada kehidupan mereka yang tidak kondusif di Korea Selatan. Setibanya di Korea Selatan dan menjalani kehidupan sosial, pada stereotip masyarakat Korea Selatan adanya perbedaan identitas menjadikan pengungsi Korea Utara secara sosial sering mengalami kesenjangan. Pada survei dari *world values* juga menyatakan bahwa 42 % masyarakat Korea Utara menghindari lingkungan minoritas asing dan menolak orang asing di sekitar mereka, karena karakteristik homogenitas yang dibawa masyarakat Korea Selatan sejak lama. (Katrine H.S Moon 2016).

Adapun hal lain yang menjadikan diskriminasi masih dirasakan Pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan melihat pada data kementerian unifikasi di 2019-2020 terakhir sebanyak 1000 Pengungsi Korea Utara menyebrangi perbatasan dan tinggal di Korea Selatan yang diikuti juga pada permasalahan

adaptasi mereka dan juga pada pemerintahan Moen Jae In yang dikritik tidak banyak meratifikasi permasalahan Pengungsi korea Utara di negaranya. Kritik tersebut ada pada pernyataan pengungsi Korea Utara yang menganggap bahwa pemerintahan Moon Jae-In sering mengabaikan hak Pengungsi Korea Utara, dengan perhatian pemerintahan Moon saat itu dengan adanya reunifikasi antara Korea dan fokus pemerintah lebih banyak terhadap reunifikasi tersebut (Pramudyani 2020).

Lalu, berlanjut pada 2020 dimana banyaknya pemberitaan diskriminasi pengungsi pada pemerintahan Moon Jae-In. Pemberitaan ini pada wawancara pengungsi Korea Utara yang mengalami diskriminasi di Korea Selatan, hal ini dilihat juga di 2020 Komisi Hak asasi Manusia Nasional desak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan diskriminasi, Kebijakan diskriminasi ini merupakan kebijakan yang sudah lama disuarakan di Korea Selatan sejak 2006 yang lalu. (KBS News, 2020). Dengan kebijakan diskriminasi ini ditujukan terutama pada penyetaraan gender, ketenagakerjaan, kelompok rentan/imigran seperti warga Korea Utara di Korea Selatan. Hal ini menjadi salah satu penyebab dalam diskriminasi warga Korea Utara di Korea Selatan pada pemerintahan Moon Jae-In masih terjadi.

Dalam hal tersebut menjadikan penelitian ini atas isu diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea selatan pada pemerintahan Moon Jae-In, dimana tahun 2019 hingga 2020 terdapatnya kritik dan kasus diskriminasi yang masih dirasakan pengungsi Korea Utara.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh warga Korea Utara dilihat dari segitiga kekerasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan :

Mengetahui diskriminasi yang terjadi pada Pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan dengan analisis menggunakan Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung.

1.4 Cakupan Penelitian

Diskriminasi Pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan menjadi cakupan penelitian karena melihat pada masa pemerintahan Moon Jae-in pada 2019 hingga 2020 masih terciptanya diskriminasi Pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan, pada 2019 atas tingginya kritik pengungsi pada pemerintahan Moon dengan menyatakan pemerintah kurang dalam melindungi pengungsi dan hak pengungsi Korea Utara di Korea Selatan (Pramudyiani 2020). Kritik ini didasari pada kasus yang terjadi atas pengungsi Korea Utara seperti penedeportasian paksa pengungsi Korea Utara oleh pemerinta Moon Jae-In. lalu kurangnya perlindungan dan kesetaraan yang dirasakan dilihat pada kasus pengungsi Korea Utara yaitu Kim dengan mendatangi kantor kementerian unifikasi Korea Selatan atas diskriminasi yang dia terima terutama dalam berideologi. Diskriminasi yang terjadi pada 2019 atas kasus pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan mengalami diskriminasi dengan melihat pengaruh tersebut pada survei *world values* sebanyak 1000 lebih Pengungsi Korea Utara

menyebrangi perbatasan dan datang menuju Korea Selatan diikuti permasalahan adaptasi mereka (Anindita 2020, 280).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini agar sistematik memerlukan data dan sumber dari beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang terkait diskriminasi Pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan.

Seperti halnya mengacu pada penelitian jurnal yang berjudul *"Gelombang Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan : Politik Domestik, Integrasi dan Permasalahan Sosial"* (Vinesh 2020). Pada jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Korea Selatan berlaku untuk pengungsi Korea Utara yang menjadi salah satu fokus utama pada jurnal tersebut. Selain itu juga jurnal menjelaskan permasalahan yang dialami pengungsi Korea Utara secara sosial Di Korea Selatan dan memaparkan seperti apa faktor pengungsi yang menyebrangi perbatasan.

Dalam jurnal yang berjudul *"Hubungan Korea Utara Dan Korea Selatan dalam Isu Internasional"* oleh Silmi Syafira Somawan (Syafira 2022). menjelaskan secara geografis hubungan kedua negara terlebih hubungan kedua negara pada kacamata internasional, dimana dunia internasional melihat bahwa sudah tidak asing lagi bagi mereka akan propaganda hubungan kedua negara yang tidak pernah usai pada perang dingin. Ketegangan yang berkepanjangan terutama pada lingkup politik, membuat dunia internasional memahami perang dingin antara kedua negara Korea.

Lalu pada jurnal artikel oleh Seo Young-Cho yang berjudul : *The Effect of social identity on integration of social minorities: the case of North korean*

refugees in South Korea (Young 2020). Mengatakan bahwa sebuah identitas yang minoritas sangat membawa mudahnya tercipta kesenjangan, terlihat pada survei yang ada pada jurnal terhadap pentingnya identitas pada aktivitas sosial kaum minoritas yang diterima Di Korea Selatan seperti pengungsi Korea Utara.

Melihat juga pada buku Walter Carlsnaes yang berjudul "Nasionalisme and etnis : dalam Hubungan Internasional" (Carlsnaes 2021). mengemukakan pernyataan mengenai dilemma negara pada sebuah keamanan hak hidup kaum minoritas di dalamnya. Dalam konteks problematik sosial antara kaum minoritas Korea Utara dengan Mayoritas Korea Selatan, Menjadikan sebuah acuan pada setiap aspek pernyataan yang dituangkan dalam jurnal tersebut. Sehingga hal ini bisa melihat sebuah sisi di mana pemerintah negara yang terlibat membawa perannya pada indikator hak asasi manusia untuk pengungsi Korea Utara di negaranya. Sehingga pada tinjauan pustaka menyimpulkan bahwa sebuah kekerasan diskriminasi yang dirasakan oleh pengungsi Korea Utara sebagai kelompok yang lemah dengan diikuti permasalahannya secara sosial, Sehingga melihat juga peranan pemerintah pada perlindungan kelompok minoritas yang pada penelitian adalah pengungsi Korea Selatan yang masih dipandang sebagai kelompok yang sering dengan mudahnya terjadi diskriminasi terhadap mereka atas perbedaan identitas.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan konsep Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung dalam melihat diskriminasi yang terjadi pada pengungsi Korea Utara Di Korea Selatan,dimana dalam konsep ini adanya komponen kekerasan kultural, structural, dan langsung (Galtung,1969). Pada

tulisannya yang berjudul *Cultural Violence 1990*, Dimana Segitiga yang dicetuskan oleh Johan Galtung terdiri atas tiga indikator tingkatan yang berbeda yaitu Kekerasan langsung *(Direct Violence)*,kekerasan struktural *(Structural Violence)* dan kekerasan kultural *(cultural violence)*.

Dalam konsep teori ini suatu komponen Segitiga Kekerasan mempunyai definisi yang berbeda, dimana Kekerasan Kultural, Struktural, dan Langsung yang masin-masing komponen tersebut akan saling berkaitan dalam melihat kekerasan. Dalam melihat Kekerasan Kultural, Johan Galtung mengatakan kekerasan ini mempunyai komponen didalamnya yaitu, ideology, agama, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal, dan kosmologi. Kekerasan Kultural ini bisa menjustifikasi serta legitimasi atas Kekerasan Langsung dan Struktural, dengan Kekerasan Kultural merupakan kekerasan yang dibiasakan serta dibenarkan pada lingkungan sosial jika kekerasan tersebut terjadi. Sehingga Kekerasan Kultural bisa menjustifikasi dan melegitimasi Kekerasan Langsung dan Struktural bisa terlihat lalu dibenarkan (Johan Galtung 1990).

Selanjutnya Kekerasan Struktural yang dimana bersifat menciptakan luka pada kebutuhan dasar suatu manusia yang mengalaminya. Pada karakteristiknya lebih tersembunyi sehingga tidak ada pihak yang bisa diminta bertanggung jawab pada kekerasan yang terjadi. Dalam hal ini Johan Galtung mempertajam kebutuhan dasar yang terluka yaitu terciptanya penetrasi, segmentasi, marginalisasi lalu fragmentasi. Pada penetrasi sebuah istilah yang menciptakan suatu stereotip kepada kelompok lemah dan hal ini diikuti pada segmentasi yang mewujudkan pandangan secara parsial atas kekerasan yang terjadi. Lalu marginalisasi merupakan istilah dengan menjaga kelompok yang lemah dan diikuti oleh fragmentasi untuk melindungi kelompok lemah

(underdog) dalam menjauhi suatu kelompok yang dianggap lemah satu sama lain. (Johan Galtung 1990, 294).

Dan Kekerasan Langsung dengan Johan Galtung melihat bahwa kekerasan tersebut lebih mudah diidentifikasi serta terlihat yang mengetahui secara langsung adanya korban dan pelaku di dalamnya serta menciptakan tidak hanya perlakuan fisik melainkan juga verbal. Pada Kekerasan Langsung, Johan Galtung membagi kelompok kekerasan langsung atas empat keterangan. Dalam hal ini yaitu adanya kejahatan dengan menciptakan kerugian pada kelompok masyarakat yang menciptakan kematian atau hilangnya nyawa manusia tersebut. Lalu adanya keterbatasan yang menyebabkan penderitaan, jauhnya kesejahteraan dan kebebasan dari suatu sanksi. Terakhir yaitu adanya doktrin suatu golongan masyarakat yang menciptakan pengasingan pada kelompok lemah (Johan Galtung 1990).

.

Gambar 1 : Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber : Cultural Violence (Galtung 1990)

Dalam hal ini beberapa komponen kekerasan memberikan sebuah struktur yang berbeda juga, di mana Johan Galtung meratifikasi masing-masing komponen dengan indikator yang berbeda. Melihat tipologi yang diberikan Johan Galtung dimana hanya ada dua indikator dalam melihat tipologi tersebut yaitu suatu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Hal

ini karena kekerasan kultural merupakan dasar dalam melegitimasi kekerasan dalam bentuk langsung maupun struktural dan membuat itu menjadi benar.

Dalam melihat diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan menjadikan tipologi kekerasan atas dua komponen, atas kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Hal ini karena terciptanya diskriminasi pengungsi Korea Utara pada dasarnya hadir karena adanya kekerasan kultural, sehingga terciptanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural secara tipologi. Hal ini karena Johan Galtung lebih mempertajam komponen terciptanya kekerasan tersebut yang berasal dari kekerasan kultural. Selain itu masing-masing aspek menurut Johan Galtung bisa saling terhubung atas satu fenomena yang membuat tipologi saling berkaitan satu sama lain. Dengan menjadikan rangkaian tipologi seperti berikut :

Tabel 1 : Tipologi Kekerasan

Johan Galtung	**Kebutuhan Bertahan Hidup**	**Kebutuhan kesejahteraan**	**Kebutuhan Identitas**	**Kebutuhan Kebebasan**
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Cacat, pengepungan, sanksi, penderitaan.	Desosialisasi, Resosialisasi, Warga negara sekunder.	Represi, Pengusiran, penahanan.
Kekerasan Struktural	Eksploitasi A	Eksploitasi B	Penetrasi, Segmentasi.	Marginalisasi dan fragmentasi.

Sumber : *Cultural Violence* (Galtung 1990, 292)

Dalam melihat table tipologi menjadikan kekerasan langsung lebih dipertajam atas sebuah kekerasan yang terlihat, lalu kekerasan struktural yang kompleks. Hal ini membawa legitimasi dan justifikasi dari kekerasan kultural yang menyebabkan kekerasan langsung dan struktural terjadi dan dilihat pada table tipologi kekerasan Johan Galtung.

Dari gambar dan tabel diatas pada penelitian ini melihat konsep Segitiga Kekerasan oleh Johan Galtung, Karena untuk melihat diskriminasi yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang menjadi terciptanya kekerasan pada Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan. Yang berawal pada adanya kekerasan kultural atas perbedaan ideologi dan bahasa, lalu pada kekerasan struktural yang membawa pemerintahan Korea Selatan ikut menciptakan kekerasan pada pengungsi Korea Utara. Dan menjadi terhubung pada kekerasan langsung karena terciptanya kematian serta penderitaan yang dirasakan Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dalam diskriminasi.

1.7 Argumen Sementara

Terciptanya diskriminasi yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang tinggal Di Korea Selatan didasari atas perbedaan yang tercipta sejak pembagian semenanjung Korea, Hal ini mendasari kekerasan kultural yang mencakup dari lima aspek yaitu agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu formal, ilmu empiris, dan kosmologi. Dalam hal ini diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan memperlihatkan adanya Ideologi dan bahasa. Dengan perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara membawa diskriminasi tersebut muncul, sebagaimana warga negara Korea Utara masih membudayakan homogenitas dan tidak menerima adanya ideologi lain disekitarnya. Lalu melihat fenomena diskriminasi yang terjadi pada pengungsi juga menciptakan kekerasan struktural didalamnya hal ini dimana pada kasus diskriminasi pengungsi yaitu pendeportasian dan kematian pengungsi. Sehingga dalam melihat kekerasan kultural terjadi pada dua kasus tersebut membawa kekerasan langsung juga terjadi, atas kematian pengungsi Korea

Utara Di Korea Selatan. Sebuah konsep kekerasan tersebut seperti pada ideology dan bahasa dari kultural sendiri yang memiliki kasus berbeda dalam meratifikasinya. Begitu juga dengan struktural yang membawa kasus pendeportasian serta kematian juga meratifikasi kekerasan langsung (Aderi 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif diaplikasikan untuk tujuan memahami akan kekerasan yang terjadi. dimana hal ini berhubungan dengan permasalahan yang terjadi pada kelompok pengungsi Korea Utara di Korea Selatan. Sebuah pernyataan Kualitatif pada sebuah penelitian menekankan penguraian sebuah studi secara kualitatif dengan mendalami sebuah proses serta makna (*meanings)* (Denzin dan Lincoln, 2011).

Penelitian ini juga lebih mengarah pada perhatian secara menyeluruh pada aspek sosial sehingga hal yang terjadi pada sebuah aktivitas sosial menciptakan hasil dari penelitian Kualitatif. Selain itu metode kualitatif yang dipakai pada penelitian menyangkut :

1. Sebuah penelitian Kualitatif memberikan pemahaman yang luas pada permasalahan yang terjadi oleh pengungsi Korea Utara di Selatan dalam mengalami diskriminasi secara sosial.
2. Memberikan pemahaman analisis pada keadaan pengungsi Korea Utara di Korea Selatan sebagai kelompok minoritas yang lemah serta kebutuhan yang bisa diperoleh pengungsi.

3. Penelitian kualitatif memberikan peneliti dalam menganalisis penggunaan kebijakan untuk pengungsi Korea Utara oleh pemerintah Korea Selatan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan adalah pengungsi Korea Utara dalam mengalami diskriminasi dan pemerintah yang menciptakan diskriminasi. Objek penelitian yaitu diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dilihat dalam konsep segitiga kekerasan Johan Galtung.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan karakteristik data sekunder, data ini mengacu pada sebuah informasi yang dikumpulkan. Informasi tersebut dikumpulkan pada sumber yang sudah ada, seperti publikasi serta analisis oleh media internet,jurnal,buku dan *news paper*. Dengan karakteristik pada data sekunder ini adalah mendukung sumber data seperti buku-buku yang berkaitan pada pelaksanaan penelitian. Selain itu sebuah data sekunder bersumber secara tidak langsung, sehingga sumber data tidak langsung diperoleh oleh pengumpul data melainkan mengumpulkan sumber yang sudah disediakan.

1.*8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian dilakukan dengan mendalami aspek permasalahan, setelah itu melanjutkan pada tujuan atas penelitian. Dilanjutkan melakukan studi literatur yaitu sebuah kegiatan yang berhubungan pada pengumpulan data dengan membaca dan mencatat lalu memperoleh sebuah bahan untuk penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan secara keseluruh bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Lalu

peneliti mengumpulkan sumber data yang berhubungan pada masalah serta topik penelitian, melalui jurnal,artikel,internet dan buku. Setelah data yang relevan dikumpulkan maka penulis mengolah lalu menganalisis sumber dengan dituangkan dalam bentuk bab dan sub-bab disertai pada kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I pada penelitian ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, dan metodologi.

Bab II akan menjelaskan seperti apa konteks gambaran umum bentuk diskriminasi Kultural menurut segitiga kekerasan Johan Galtung pada pengungsi Korea Utara. Diskriminasi sosial yang dilakukan kelompok mayoritas Korea Selatan kepada minoritas pengungsi Korea Utara. Dalam hal ini memberikan bentuk diskriminasi yang diterima oleh pengungsi Korea Utara dalam sosial Korea Selatan.

Bab III penulis akan memaparkan bentuk diskriminasi kekerasan struktural yang di mana secara tidak langsung dirasakan oleh pengungsi baik itu dari aktor negara maupun kebijakan yang ada, Lalu melihat komponen diskriminasi apa yang terjadi kepada pengungsi secara sosial. Selain itu pemaparan berikutnya akan membahas mengenai kekerasan langsung yang dirasakan pengungsi setelah melewati masa pelatihan program pemerintah, Dan menjalani kehidupan sosial Korea Selatan tetapi masih mengalami kesulitan karena identitas mereka.

Bab IV penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran yang bertujuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

BAB II

Diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan Dilihat Dari Kekerasan Kultural

Dalam melihat diskriminasi yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan bisa dilihat pada konsep segitiga kekerasan Johan Galtung atas komponen kultural. Kekerasan kultural memberikan tujuh aspek didalamnya yaitu agama, bahasa, ideologi, seni, ilmu formal, ilmu empiris dan kosmologi (Johan Galtung 1990, 296-301). Namun hanya dua aspek yang tercipta dalam melihat diskriminasi yang terjadi yaitu ideologi dan bahasa. Sedangkan lima aspek lainnya tidak terwujud melihat latar belakang diskriminasi yang terjadi di pemerintahan Moon Jae-in, dan hanya dua aspek yang terjadi pada pengungsi. Pada seni tidak dipilih karena tidak membawa diskriminasi yang terjadi pada Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan atas dasar suatu seni, lalu ilmu formal yang dimana menggambarkan layaknya matematika dengan pemahaman secara rasional dan belum bisa dibuktikan. Oleh Karena itu dalam kasus diskriminasi pengungsi Korea Utara tidak bisa digambarkan dalam hal tersebut. Selanjutnya ilmu empiris yang merupakan suatu ilmu perekonomian dan produksi, dan menjadikan hal tersebut tidak membawa diskriminasi pada aspek ilmu empiris. Dan kosmologi tidak diratifikasi karena sumbernya atas suatu budaya yang natural, dalam melihat Korea Selatan dan Korea Utara suatu aspek kebudayaan tersebut mengalami perubahan karena adanya sebuah pembagian semenanjung yang diikuti kubu yang menguasai masing-masing semenanjung Korea.

2.1 Kekerasan kultural Aspek Ideologi

Sebuah kekerasan kultural oleh Johan Galtung mempunyai komponen pembagian aspek salah satunya ada pada aspek ideologi. Aspek ideologi menurut Johan Galtung adalah suatu yang menciptakan pengaruh secara luas pada suatu pandangan terhadap kelompok manusia. Dalam hal ini suatu negara pada strukturnya sudah pasti mempunyai suatu kepercayaan ideologi mereka sejak dulu. Dengan Johan Galtung menjelaskan bahwa jika mengharapkan suatu agama dalam sebuah ideologi maka, Tuhan dan politik merupakan negara yang menunjukkan suatu karakteristik yang tidak berbeda dan begitu juga suatu negara dianggap sebagai penitipan tuhan dengan kendalinya agar mewujudkan kehidupan (Johan Galtung 1990, 298-299).

Pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence,* Membawa negara sebagai penitipan oleh tuhan dengan negara tersebut mempunyai hak dalam mengontrol,menghancurkan serta menciptakan suatu kehidupan negara yang dilakukan oleh kelompok kekuasaan yang tinggi dengan tindakan diskriminasi kelompok lemah. Tindakan tersebut dilakukan sebagai suatu tindakan yang tidak terlihat dengan di mana mengatasnamakan kebangsaan dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa, sehingga Galtung beranggapan bahwa suatu modernitas akan menolak pada tuhan atau kepercayaan tetapi akan menuntut secara terbuka atas adanya perbedaan oleh kaum otoritas. Pernyataan tersebut menjadikan kekerasan kultural menciptakan pertentangan adanya perbedaan lain dan lebih membenarkan penolakan sikap tersebut. (Johan Galtung 1990, 298).

Korea Selatan sering diakui oleh cendikiawan bahkan PBB juga ikut mengomentari atas tingginya permasalahan rasis di Korea Selatan yang

sering terjadi. hal ini karena besarnya diskriminasi yang diberikan oleh kelompok warga Korea Selatan. Perbedaan yang dirasakan pengungsi Korea Utara di Korea Selatan menciptakan kekerasan diskriminasi pada kelompok mereka, Hal ini didasari karena pengungsi yang tinggal di Korea Selatan masih membawa ideologi dinasti Kim. Ideologi ini disebut sebagai suatu ideologi bernama *Juche,* ideologi ini menekankan atas suatu ajaran prinsip yang mengharuskan percaya dan menjunjung negaranya (Fajar Muandar 2017, 142). *Juche* merangkum beberapa makna dasar di mana ada *Chaju* sebagai suatu kedaulatan politik dengan melihat tanah air satu-satunya arah penerusan kehidupan, *Charip* merupakan suatu kemandirian segi ekonomi dan tidak membuka tangan atas negara lain dan yang terakhir adalah *Chawi* sebagai kekuatan militer (Fajar, 2017).

Karena perkembangan Korea Selatan serta modernitas membawa arus laju untuk warga negaranya. Dalam perkembangannya Korea Selatan lebih mengkiblatkan budaya barat dan menjadikan hal tersebut mengubah segala komponen yang ada di Korea Selatan termasuk ideologi. Warga Korea Selatan menganut ideologi demokrasi dengan agama Buddhisme dan Konfusianisme, Dengan dominan menganut agama Kristiani. Diskriminasi pada aspek ideologi adalah sebagai perwujudan tingginya kepercayaan masyarakat Korea Selatan pada suatu ideologi tersebut dengan menganggap sebuah ideologi mereka adalah yang terbaik dari leluhur. Besarnya dominasi ideologi yang mereka ilhami memberikan pengungsi Korea Utara mengalami tekanan akan identitas yang dipegang (Aanchal Midha 2018, 353).

Pertentangan ideologi yang dialami pengungsi Korea Utara di Korea Selatan mendasari adanya suatu kekerasan kultural, prasangka buruk yang

tercipta pada masyarakat sosial Korea Selatan pada pengungsi Korea Utara yang menganggap bahwa pengungsi yang hadir hanya akan memberikan dampak sumber daya dan perusakan ideologi mereka (Williams, 2021). Menurut laporan *Korea Hana Foundation* 2018 sampai 2020, lebih dari 2000 pengungsi Korea Utara meninggalkan negaranya dan melewati perbatasan menuju Korea Selatan. Pada laporan juga menunjukkan bahwa dari populasi yang ada pengungsi, didapati pada sikap berbeda dan mengalami permasalahan diskriminasi pada latar belakang mereka (Hana Foundation, 2019-2020). Dilihat pada kasus terdahulu yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan di mana pada 2018 yang sampai saat ini masih dirasakan pengungsi.

Pengungsi bernama Kim Young-Sik membuka suara untuk bisa kembali lagi ke Korea Utara, hal ini karena Kami merasa bahwa harapan dia untuk bisa tinggal di negara Korea Selatan bisa memperoleh kehidupan yang sejahtera sebagai warga negara. Hal ini yang dia tidak dapatkan saat tinggal di Korea Utara, di tahun 1962 Kim menyebrangi perbatasan menggunakan kapal mata-mata Korea Utara yang melintasi rute panjang agar tidak terdeteksi. Tetapi setelah rute panjang tersebut kapal yang dinaiki oleh mereka ditangkap pihak Korea Selatan dan Kim dipenjara selama 37 tahun, Setelah dibebaskan Kim perlu melewati masa adaptasi dan integrasi oleh pemerintah Korea Selatan. Setelah melewati masa tersebut dia diberikan kewarganegaraan Korea Selatan oleh pemerintah tetapi, menurut hasil wawancara BBC News 2020 tersebut Kim mengatakan hidup sosial Korea Selatan sangat penuh tekanan di mana selama dia menjalani hukuman penjara aparat selalu menyiksa dan selalu menekankan bahwa ideologi yang dianut

Kim yaitu *Juche* pada saat menjadi warga negara Korea Utara merupakan ideologi yang tidak manusiawi dan mereka memaksa untuk mengubah ideologinya. Pada wawancaranya di BBC News juga mengatakan saat dipenjara Kim mengklaim bahwa disiksa agar mengaku sebagai komunis. Tidak hanya itu Kim juga menceritakan sulitnya dia bisa diterima ditengah masyarakat Korea Selatan karena Ideologi komunis yang masih dianut Kim, Hal ini terlihat setelah Kim keluar dari penjara dia mendapat perlakuan yang memberikan dia tekanan. di mana sebagai komunis di mata warga Korea Selatan saat itu bahwa dia harus mengubah ideologi yang dia bawa, Tetapi Kim tidak melakukan apa yang diminta warga Korea Selatan kepadanya hal ini membuat Kim terus menerus mendapati stereotip pada ideologinya oleh masyarakat Korea Selatan. Diskriminasi yang diterima Kim didasari atas Kim menolak untuk meninggalkan kepercayaan ideologinya, dimana dia merasa negaranya merupakan tempat keyakinannya untuk bersandar (BBC News, 2020)

Dengan hal ini Kim merasa kebebasannya untuk berideologi di negara demokrasi tidak terpenuhi bahkan sudah mempunyai hak konstitusional kewarganegaraan Korea Selatan, sampai dengan merasa hidup di negara demokrasi tersebut lebih buruk dari yang dia kira. Perasaan yang dirasakan Kim membawa Kim bertekad kembali untuk tinggal di Korea Utara, Hal ini dilihat pada pemberitaan BBC News 2020 dimana Kim dan kelompok pengungsi Korea Utara lainnya melakukan aksi protes di depan gedung Kementerian Unifikasi Soul. Gerakan protes ini dilakukan Kim dan kelompok pengungsi Korea Utara lainnya karena, melihat juga bahwa di 2018 hingga 2020 pemerintahan Moon fokus dan aktif pada reunifikasi antara

Korea. Menjadikan Kim berharap agar kasus mereka dimasukkan kedalam diskusi kedua negara dan harapan terwujudnya kesepakatan untuk mengirim mereka kembali ke Korea Utara. Tetapi sebagai penetapan pemerintah sebuah perwujudan dari Kim dan kelompok pengungsi lainnya untuk bisa dipulangkan lagi merupakan suatu mekanisme yang belum bisa diberikan pemerintah karena tidak adanya respon yang dilakukan pemerintah pada aksi protes tersebut.

Dengan melihat kasus yang dialami pengungsi dengan doktrin ideologi yang negatif oleh pihak Korea Selatan sehingga menciptakan ketakutan tersendiri pada pengungsi selama masa pengadaptasian sosial dalam melakukan aktivitas sosial (Seo Young Cho, 2022). Hal ini menggambarkan kaum liberal seperti masyarakat Korea Selatan cenderung tidak setuju dengan adanya kepercayaan lain yang pernah dianut kelompok lain. Tetapi membawa ketidakterimaan pengungsi atas pandangan stereotip oleh kaum mayoritas dan mengharapkan perwujudan praktik kebijakan pada kekerasan yang terjadi tersebut menjadikan perbedaan ideologi merupakan hal yang bisa terciptanya kekerasan pada pengungsi Korea Utara terlebih sebagai kelompok minoritas (Jae Yeon Kim, 2022).

Pada masa pemerintahan dari Moon Jae-In, Sehingga dalam melihat pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dengan kekerasan diskriminasi yang dirasakan sejak mengawali hidup di pemukiman kembali menjadikan sebuah ideologi suatu entitas sebagai dasar diskriminasi kekerasan. Walaupun kemajuan yang dirasakan pada warga Korea Selatan dalam melihat berbagai macam modernisasi serta budaya, tetapi sebuah ideologi yang didasarkan turun-temurun mewujudkan rasa tingginya homogenitas warga Korea Selatan

terhadap pengungsi Korea Utara dan membawa pengaruh yang besar pada seluruh komponen nilai kehidupan pengungsi Korea Utara. (Hanafiaty, 2019).

Dari hal tersebut Johan Galtung dalam pernyataanya atas suatu negara merupakan penitipan oleh tuhan dengan kepemilikan kuasa dalam menguasai berdasarkan kaum otoritas suatu negara. Melihat kasus yang terjadi pada diskriminasi yang dirasakan atas latar belakang ideologi yang dianut pengungsi saat berada di Korea Selatan menjadikan sebuah kekerasan kultural aspek ideology terjadi, atas prasangka buruk warga Korea Selatan dan menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dipilih merupakan sesuatu yang dideskripsikan bukan sebagai manusia dan sebuah modernitas selalu menolak, tetapi semua tergantung apa yang akan dipilih dan tidak dipilih oleh sekelompok pelaku manusia yang memegang otoritas (Johan Galtung 1990, 292).

Hal tersebut mengaitkan apa yang terjadi dengan pengungsi Korea Utara di Korea Selatan, atas diskriminasi pada ideologi pengungsi Korea Utara yang beranggapan bahwa suatu ideologi yang dibawa sejak kecil merupakan satu-satunya ideologi yang benar oleh warga Korea Selatan. Sehingga kekerasan pada aspek ideologi Johan Galtung yang sering mengarah pada pengungsi merupakan akar atas budaya kentalnya ideologi yang dianut atas tingginya sifat homogenitas warga Korea Selatan dalam ideologi menjadikan posisi pengungsi Korea Utara tidak dipandang sebagai sesuatu yang berhak atas perlindungan yang sah. Sehingga dalam kasus Kim hal ini menurut Johan Galtung dikatakan sebagai suatu kekerasan kultural pada aspek ideologi yang tidak bisa didapat secara langsung (Johan Galtung, 298-299).

2.2 Kekerasan Aspek Bahasa

Pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence* galtung mengatakan bahwa suatu bahasa merupakan kekerasan yang lebih halus dan tidak terlihat secara langsung (Johan Galtung 1990, 299). Suatu bahasa merupakan sebuah komponen dari kepentingan atas siapa yang memakai bahasa tersebut, kelompok yang mempunyai kuasa dan menguasai bahasa dengan bahasa mewujudkan sebuah kepentingan kekuasaan (Habermas, 2000). Dari bahasa yang sudah menjadi bagian identitas sejak lahir membawa bahasa sebagai komponen pengendalian atas perbedaan yang tidak dipilih oleh kelompok yang memiliki otoritas. Konsep bahasa merupakan sesuatu yang menjadi karakteristik pada kelompok otoritas, sehingga pada kekerasan kultural aspek kultural Johan Galtung membenarkan bahwa suatu bahasa merupakan salah satu aspek dasar terciptanya kekerasan budaya yang tidak terlihat tetapi menjadi nyata (Johan Galtung 1990, 299).

Dalam melihat diskriminasi pengungsi Korea Utara di mana mengalami kekerasan secara tidak langsung menjadikan teori Johan Galtung sebagai bentuk kekerasan kultural, ajaran sedari kecil menjadikan antara pengungsi Korea Utara dengan masyarakat Korea Selatan menciptakan kesenjangan. Perbedaan kubu yang mendasari banyaknya perubahan struktur pada Korea Selatan dan Korea Utara, warga negara Korea Selatan dengan segala modernitas yang mengikuti barat menjadikan tatanan bahasa ikut mengalami perubahan mengikuti arus modernisasi. Lalu Korea Utara sendiri mengikuti tatanan Uni Soviet dengan banyak mengadopsi tatanan bahasa

Rusia, dan perbedaan antara tatanan bahasa kedua negara terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Perbandingan Aksen

NO	Aksen Korea Selatan	Aksen Korea Utara
1.	Juice = Juseu	Juice = Danmul
2.	Doughnut = Donut	Doughnut = Garakji bbang

Sumber : (Shreyas Reddy, Kang, dan Colema 2019)

Pada tabel 2 menjelaskan pembeda antara aksen yang disebutkan oleh Korea Utara di mana perbedaan tersebut melatarbelakangi apa atas terciptanya diskriminasi pada pengungsi Korea Utara. Karena seringnya pengungsi Korea Utara mendapati stereotip sebagai latar belakang identitasnya, menjadikan ketakutan bagi pengungsi dan lebih sering menyembunyikan identitas mereka sebagai warga Korea Utara. Yang di mana sebuah aspek modernitas suatu negara menjadi tolak ukur dalam menciptakan perubahan baik itu bahasa, agama, dan budaya. Warga Korea Selatan sendiri memiliki sikap homogenitas tinggi yang membawa perbedaan sebagai suatu yang menjadikan hal tersebut mewujudkan kesenjangan yang tidak terlihat dengan menyerang pemikiran, sosial, etika dan sikap pada perbedaan tersebut. Dari hal tersebut menjadikan bahasa merupakan aspek yang tidak hanya sekedar tata bahasa saja melainkan sesuatu yang bisa dikuasai oleh kelompok orde baru yang tidak memilih pihak seperti dari komunis dan sejenisnya sebagai bagian dari mereka (El Harakah, 2000).

Korea Selatan sebagai negara dengan yang kemajuan dalam segala aspek termasuk keterbukaannya pada hak-hak demokrasi tidak membawa

perubahan untuk sikap yang dimiliki warga Korea Selatan terhadap kelompok yang berbeda pada latar belakang yang mereka miliki (Masnah Nurhadi, 2018). Pada kasus yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan, sulitnya berkomunikasi menjadikan keterlambatan pengungsi dalam melakukan aktivitas sosial di Korea Selatan. Para pengungsi Korea Utara sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang keadaan negara pada media pemerintah Korea Selatan dan sering kali mendapatkan penghinaan atas identitas mereka oleh konservatif Korea Selatan setiap harinya (Reddy dan Kang , 2019).

Keterlambatan bahasa serta ketakutan dalam latar belakang identitas mereka membawa pengungsi pada rasa untuk mengisolasikan diri, hal ini yang terjadi pada pengungsi Young-nam Eom, Sejak 2010 di mana Young ikut menyebrangi perbatasan dan menuju ke Korea Selatan. Tetapi Young sulit dalam beradaptasi dan selalu mendapati diskriminasi atas latar belakangnya sebagai warga Korea Utara di mana untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini dilihat pada laporan wawancara Sophie Williams 2021, Kim Ji-young dalam pengalamannya setahun terakhir sebagai pengungsi Korea Utara di Korea Selatan mengatakan bahwa dalam dunia pendidikan dan pekerjaan para pengungsi sangat sulit dijalani setelah tiba di Korea Selatan sehingga dia sebagai warga Korea Utara yang berada dilingkungan baru harus bisa beradaptasi lebih keras lagi, hal ini karena seringnya kegagalan adaptasi bisa menimpa kelompok pengungsi karena tidak ada kesiapan mental. Dia dan kelompok pengungsi sampai saat ini banyak sekali mendapatkan kesulitan salah satunya adalah pada dunia pekerjaan, yang menjadi sulit menurutnya karena sangat susah untuk diterima lingkungan

pekerjaan Korea Selatan dengan yang mendasari hal tersebut atas latar belakangnya dan perbedaan aksen yang dia bawa sebagai mantan warga Korea Selatan. Young mengatakan bahwa minim sekali pekerjaan yang bisa didapatkan dan dilakukan orang Korea Utara di Korea Selatan, sehingga menjadikan suatu dilema untuknya saat ini dalam mendapatkan kesetaraan dalam dunia kerja stereotip identitasnya, karena hal tersebut Young Nam merasakan dalam dunia pekerjaan banyak dari kelompoknya diabaikan. Adanya stereotip dalam identitasnya di lingkungan Korea Selatan terlebih dalam berkomunikasi yang merupakan wujud utama dalam melakukan aktivitas sosial di Korea Selatan, menjadikan komunikas dalam melihat aksen dia sebagai warga Korea Utara di Korea Selatan sudah pasti akan mendapatkan stereotip tersebut. Dengan ini Young menyatakan saat melakukan tahap wawancara pekerjaan yang merupakan komponen diskriminasi tersebut dia rasakan karena teridentifikasinya identitas Young, dari hal tersebut menjadi pemicu bahwa suatu perbedaan aksen bahasa memberikan stereotip Young sebagai warga Korea Utara dan kesulitan dalam mendapat pekerjaan begitupun yang dirasakan Young dari sejak setahun terakhir hingga sampai saat ini (Williams, 2021).

Atas kasus tersebut membawa pengaruh yang signifikan untuk pengungsi sampai sekarang di mana komunikasi merupakan komponen utama dalam melakukan aktivitas sosial terlebih dalam pendidikan dan dunia pekerja. Sikap homogenitas yang dibawa secara sosial oleh warga Korea Selatan menjadikan pengungsi ketakutan akan latar belakang identitas mereka, hal ini menciptakan pengungsi jarang untuk melakukan aktivitas sosial dan banyak mengalami isolasi dari masyarakat Korea Selatan (Lee

2003 dan Yun 2006). Kesediaan pemerintah Korea Selatan dengan segala programnya untuk pengungsi Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-in sangat kompleks, Dengan tempat tinggal dukungan pemerintah serta uang saku sebanyak 8 juta Won Korea atau sekitar $7.000 USD serta mendapatkan identitas kewarganegaraan Korea Selatan (C.Borders, 2018). Dengan pengungsi yang memiliki keluarga menetap di Korea Selatan, setelah keluar dari Hanwon tidak mendapatkan penyediaan tempat tinggal melainkan diberikan Lotere sebuah rumah subsidi untuk yang beruntung dan pendidikan terbarukan. Program yang diberikan serta pemberdayaan pada Kementerian Unifikasi korea, tidak menjadikan pengungsi terbebas dari rasa dan trauma pada prasangka buruk masyarakat Korea Selatan. Pada dasar latar belakang negara modern menjadi penghambat untuk pengungsi dalam menyesuaikan komunikasi dan dunia kerja pada lingkungan negara baru. Hal tersebut menjadi dilema baru untuk para pengungsi dalam bertahan hidup di lingkungan Korea Selatan. Mendapatkan fasilitas dengan pelatihan yang beragam serta pengadaptasian dalam nilai hidup lingkungan Korea Selatan, Tidak menjadikan pengungsi mudah dengan cepat dalam langsung andil membawa aktivitas hidup di Korea Selatan (Vinesha Anindita 2020, 290).

Penyuaraan kebijakan pada kelompok minoritas seperti pengungsi bisa diperuntukkan oleh pemerintah Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-in melihat jumlah pengungsi yang hadir sejak 2019 diikuti dengan permasalahan yang sama atas diskriminasinya sehingga dalam merealisasikan suatu kekerasan diskriminasi untuk pengungsi dan hal ini bisa mewujudkan adanya kesadaran rasa jera atau hukuman denda terhadap pihak yang melakukan atau melanggar kebijakan tersebut.

Atas bahasa menjadikan suatu kekuasaan bisa mewujudkan nilai kelompok lain yang lemah dan menciptakan perlawanan pada kelompok tersebut. Dan suatu bahasa tidak hanya menjadi sumber kepentingan melainkan menjadikan alat untuk kelompok penguasa bisa membenarkan tindakan mereka pada kelompok yang mereka anggap sebagai lemah dan tak ternilai. Nilai perlindungan pada kekuasaan bahasa menuju pada kelompok yang dari masa lampau tidak disukai atau menjadi musuh dulunya sehingga penguasa menjadikan mereka sebagai kelompok yang tidak sepaham dan tidak disukai (Mudjia Rahardjo, 2000).

Dalam hal ini teori Johan Galtung pada kekerasan kultural dalam aspek bahasa membawa kasus pengungsi di mana, Johan Galtung menyatakan bahwa suatu bahasa menjadi salah satu unsur kekerasan budaya. Apa yang dikemukakan Johan Galtung pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence* 1990*,* Mengartikan bahwa timbulnya bahasa pada masa lampau dan dipegang pada kelompok otoritas dengan menjadikan budaya prasangka hingga terus menerus. Pada kasus yang terjadi oleh pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dapat dikatakan bahwa kekerasan kultural pada aspek bahasa berhubungan dengan diskriminasi warga Korea Utara di Korea Selatan. Johan Galtung memberikan pemahaman bahwa warga Korea Utara berada di posisi tidak terlihat, dengan bahasa menjadi kontrol sosial dalam mendiskriminasikan warga Korea Utara. Sehingga perbedaan aksen bahasa menjadi penghambat untuk pengungsi Korea Utara karena adanya ketakutan stereotip identitas yang diberikan Korea Selatan pada pengungsi dan memberikan kekerasan pada pengungsi atas latar belakang bahasa yang berbeda tersebut. (Johan Galtung 1990, 292).

BAB III

Diskriminasi Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan

Melihat Kekerasan Struktural dan Langsung

Pada bab II penulis menjelaskan bagaimana aspek ideologi dan bahasa mempengaruhi diskriminasi pada pengungsi Korea Utara di Korea Selatan. Sehingga dari kekerasan kultural bisa ditemukan apakah kekerasan struktural bisa terwujud menyangkut komponen yang ada pada tipologi Johan Galtung yang akan membenarkan adanya kekerasan struktural dan langsung. Ini dipertajam pada tabel tipologi kekerasan Johan Galtung untuk melihat lebih jelas komponen tersebut tercipta :

Tabel 3 : Tipologi Kekerasan Galtung

No	Kategori Kekerasan	Kebutuhan Survival	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kemerdekaan
1	Kekerasan Langsung	Pembunuhan	mencederai,Derita dan Sanksi	Desosialisasi, Resosialisasi, Warganegara kelas dua	Represi, Penahanan, Pengusiran
2	Kekerasan Struktural	Eksploitasi A	Eksploitasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marjinalisasi, Fragmentasi

Sumber : Diolah dari (Johan Galtung, Cultural Violence 1990)

Dalam tabel diatas Johan Galtung membagi kebutuhan dasar manusia menjadi empat kelas, yaitu kebutuhan hidup, kesejahteraan, identitas, dan kemerdekaan. Lalu terbagi kedalam beberapa bagian di dalamnya dimana pada **kekerasan langsung** atas **kebutuhan hidup** berupa pembunuhan, dalam **kebutuhan kesejahteraan** berupa mencederai seseorang hingga menimbulkan

cacat fisik dan selanjutnya sanksi dan penderitaan yang menyengsarakan suatu kelompok lemah (Johan Galtung 1990, 293).

Pada **kebutuhan identitas** pada kekerasan langsung, yang didalamnya terdapat Desosialisasi yang memisahkan seseorang pada budayanya sendiri. Lalu ada Warga Negara Kelas Dua yang berarti terciptanya pemaksaan melakukan suatu budaya kelompok tertentu, dan resosialisasi merupakan pemaksaan untuk menjalani budaya tertentu. Dan terakhir **kebutuhan kemerdekaan,** didalamnya ada represi atau suatu pembatasan akses politik, sosial dan atas budaya. Selanjutnya penahanan individu atau suatu kelompok pada penjara dank amp, terakhir penahanan dengan membatasi seseorang untuk bepergian misalnya keluar negeri (Johan Galtung 1990, 293).

Pada **kekerasan struktural** atas melukai **kebutuhan hidup** didalamnya ada eksploitas A yaitu terjadinya ketidaksetaraan pada pihak berkuasa terhadap *underdog* dan hal ini menciptakan atas kematian oleh kelaparan, wabah penyakit. **Kebutuhan kesejahteraan** didalamnya ada eksploitas B yaitu kesengsaraan yang tidak diinginkan dalam malnutrisi, penyakit. **Kebutuhan identitas** didalamnya ada penetrasi yaitu memasukkan kelompok berkuasa kedalam kelompok *underdog* (lemah) dan mempengaruhi cara berpikir mereka. Lalu segmentasi adanya pengelompokan pihak lemah atas kesamaan yang mereka miliki, terakhir **kebutuhan kemerdekaan** yaitu ada marginalisasi dengan menyudutkan kelompok tertentu dengan membiarkan mereka mempunyai identitas sendiri dan fragmentasi yang berarti merusak hubungan antar kelompok lemah (Johan Galtung 1990, 293-294).

3.1 Kekerasan struktural pada Kebutuhan Bertahan Hidup (eksploitasi A) dan Kebutuhan Kesejahteraan (eksploitasi B)

Johan Galtung juga menyatakan bahwa sebuah fenomena kekerasan yang terjadi bisa saling keterkaitan pada aspek kultural, langsung, dan struktural. Sehingga Johan Galtung mempertajam dengan meratifikasinya menjadi tipologi kekerasan seperti tabel berikut untuk kekerasan struktural :

Tabel 4 : Tipologi Kekerasan Struktural

No	Kategori Kekerasan	Kebutuhan Survival	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kemerdekaan
1.	Kekerasan Struktural	Eksploitasi A	Eksploitasi B	Penetrasi, Segmentasi	Marjinalisasi, Fragmentasi

Sumber : Diolah dari (Johan Galtung, Cultural Violence 1990, 292)**.**

Untuk melihat kekerasan struktural pada diskriminasi warga Korea Utara di Korea Selatan penulis hanya melihat terlukanya **kebutuhan hidup** (eksploitasi A) dan **kebutuhan kesejahteraan** (eksploitasi B atas kesengsaraan). Pada kebutuhan identitas dan kemerdekaan tidak digunakan karena, melihat pada penetrasi tidak ada kasus diskriminasi dalam kelompok masyarakat Korea Selatan untuk mempengaruhi pikiran dan cara pandang Pengungsi Korea Utara dalam hal ini pada masa pemerintahan Moon Jae-In sendiri. Lalu segmentasi juga tidak ditemukan atas adanya pengelompokan oleh pemerintah Moon Jae-in dan warga Korea Selatan dalam terciptanya diskriminasi. kebutuhan kemerdekaan dalam sebuah marginalisasi bahwa diskriminasi pengungsi Korea Utara tidak ditemukan, dimana marginalisasi merupakan adanya penyudutan untuk kelompok lemah dengan tidak memberikan mereka mempunyai identitas sendiri. Dan fragmentasi tidak

adanya kasus yang terjadi oleh pengungsi Korea Utara dengan mereka saling bertolak belakang satu sama lain (Johan Galtung 1990, 293-294).

Menurut Johan Galtung sebuah kekerasan Struktural merupakan kekerasan yang hadir di mana adanya sebuah struktur sosial atau institusi seperti ekonomi, politik, budaya serta kesehatan atau hukum yang tersembunyi di dalamnya. Yang tatanan tersebut bisa saja menciptakan diskriminasi pada kelompok manusia sehingga menghalangi manusia dalam memperoleh hak dasar mereka. Terlebih konteks struktural Johan Galtung mengatakan aspek kebutuhan struktural menimbulkan eksploitasi A dan Eksploitasi B yang sesuai dengan pernyataan galtung bahwa jika terjadi eksploitasi A maka juga akan terwujudnya eksploitasi B. (Johan Galtung 1990, 291-305).

Johan Galtung mengatakan bahwa kebutuhan hidup dalam kekerasan struktural menciptakan adanya eksploitasi A. Eksploitasi A berarti adanya suatu ketidakadilan yang dilakukan kelompok berkuasa kepada yang lemah dengan hal tersebut menciptakan kerugian dan mengalami kematian dalam kelaparan, penyakit dan diasingkan (Johan Galtung 1990, 293). Pengungsi Korea Utara yang menjalani banyak masa integritas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara lain, hal ini karena sebelumnya para pengungsi meninggalkan negaranya karena tidak memperoleh hak hidup sepenuhnya sebagai warga negara Korea Utara. Sehingga pengungsi yang mencari suaka memilih Korea Selatan menjadi sebagai tempat tinggal, karena mengetahui sebuah demokrasi dan hukum di negara Korea Selatan sangat lebih terbuka dan modernisasi yang mempengaruhi hal tersebut untuk warga negaranya daripada negara asal pengungsi sendiri yang dominan pada pemerintahan yang otoriter (Vinesha Anindita 2020, 281). Namun laporan

survei dan wawancara beberapa pengungsi menunjukkan bahwa mereka menerima diskriminasi ketika hidup di Korea Selatan, dilihat pada survei *Korea Hana foundation* tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan faktor tertinggi terjadinya diskriminasi pada warga Korea Utara di Korea Selatan salah satunya adanya pandangan negatif terhadap pengungsi sekitar 20,1% (Danu,Saherimiko dan Dewi. 2023, 63). Hal ini menunjukkan karena adanya perselisihan identitas dari masyarakat Korea Selatan dengan pengungsi di Korea Utara. Kebijakan yang dibuka Korea Selatan di tahun 1960an dengan otomatis menerima kedatangan pengungsi Korea Utara untuk hidup dan mendapatkan kewarganegaraannya oleh pemerintah Korea Selatan. Sehingga sikap yang diterima pengungsi secara objektif dijalani menjadikan masyarakat Korea Selatan arogan pada kaum minoritas salah satunya seperti pengungsi Korea Utara. Hal ini mencakup pada respon masyarakat sosial seperti tingginya prasangka buruk yang dibawa masyarakat Korea Selatan pada identitas pengungsi Korea Utara, alasan yang menjadikan masyarakat Korea Selatan membudayakan sikap arogan yang tinggi karena bagi mereka adanya kebijakan penerimaan pengungsi Korea Utara yang hanya mengurangi sumber daya negara dan pemerintah (Aiya Sofia 2022, 32).

Kebijakan penerimaan pengungsi Korea Utara di tahun 1962 pertama kali diberlakukan oleh Park Chung Hee hingga pada masa pemerintahan Moon Jae-In dan sampai sekarang (Lankov 2006). Kebijakan penerimaan diikuti dengan pencetusan undang-undang perlindungan pembelot 1997 dengan diikuti perubahan struktur undang-undang hingga dilegalitaskan pada tahun 2001 (Refworld, 2024). Undang-undang yang dicetuskan memberikan pernyataan pada seluruh perlindungan pengungsi hingga kembali pada

pemukiman tempat tinggal, Perlindungan ini ada pada aspek hukum, sosial, pendidikan, dan tempat kerja. Sejalan dengan hal tersebut dalam melihat kasus yang dialami pengungsi memberikan batasan perlindungan yang kompleks untuk mereka yang juga sebagai bagian warga negara Korea Selatan, laporan pada *Ministry of Unification* dan *Korea Hana Foundation* memaparkan jumlah angka pengungsi yang lebih dari 1000 pengungsi di 2019 lalu yang hadir. Ini diikuti dengan seluruh permasalahan sosial yang dirasakan pengungsi dalam berinteraksi dengan kelompok masyarakat Korea Selatan. Kekerasan seringkali didapati prasangka buruk masyarakat Korea Selatan terhadap latar belakang pengungsi, Ini menjadikan pengungsi sulit dalam hal aktivitas pendidikan serta mendapatkan pekerjaan (Anindita 2020, 287-289).

Hal ini dilihat pada kasus yang pada pengungsi Korea Utara di 2019, Han Sung Ok dan putranya tinggal di pemukiman kembali Korea Selatan setelah menjalani masa investigasi selama membelot ke Korea Selatan. Menetap dan tinggal dilingkungan yang baru memberikan tekanan pada Han dan putranya, karena kesulitan dalam berinteraksi serta adanya perbedaan yang diberikan masyarakat Korea Selatan. Selain daripada itu Han sangat terbatas pada perekonomiannya sebagai pengungsi dari Korea Utara, pada wawancara direktur asosiasi Pusat Integrasi Pikiran Korea Selatan-Korea Utara oleh Kim Sung Kyung memberikan pernyataan atas penekanan warga Korea Utara yang sangat membutuhkan perlindungan kesejahteraan di Korea Selatan. Tetapi perwujudan itu menjadi sangat sulit didapatkan oleh pengungsi karena tantangan sosial pada identitas Korea Utara diantara sebagian warga Korea Selatan yang menjadi sulitnya pengungsi misalnya dalam perekonomian

atas dunia kerja, dan upah yang sangat rendah pada pengungsi Korea Utara di Korea Selatan. Atas kematian Han disinyalir atas kelaparan selama berhari-hari karena kesulitannya memenuhi kebutuhan pokok dan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini terlihat pada pernyataan wawancara BBC News pada pengungsi yang mengenali Han di mana dia belum membayar sewa apartemen pemukiman kembali pada staff pusat komunitas (Edy Pramana, 2019). Selain itu pada pernyataan pedagang pokok yang sempat didatangi Han untuk membeli kebutuhan pokok mengaku bahwa Han ingin membeli sawi di tokonya tetapi hanya sedikit sawi yang dia ambil dan menurut penjaga toko sawi tidak akan cukup untuk dimakan berdua dengan putranya. Hal ini membawa kemarahan pada pengungsi lain terhadap pemerintah Korea Selatan dan melakukan aksi demo pada upacara kematian Han dan putranya dan demo tersebut juga menciptakan kekerasan, Respon Menteri Unifikasi Korea Selatan pada saat itu meminta maaf mewakili presiden Moon secara terbuka kepada pengungsi Korea Utara karena belum kompleks dalam mensurvei pengungsi secara rutin dan berjanji akan membenahi survei menyeluruh untuk kesejahteraan pengungsi Korea Utara di negaranya (Yudha Saputa, 2019).

Pemerintahan Korea Selatan dalam merespon masalah diskriminasi pada warga Korea Utara di Korea Selatan dimana, adanya *Resettlement Policy* dengan berlandaskan *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act*. Dengan bentuk sebuah program dalam membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan pengungsi, dalam aktivitasnya mengumpulkan survei kendala dan kebutuhan pengungsi Korea Utara (Himawan dan Suratiningsih 2023, 64).

Pada tabel tipologi yang direpresentasikan Johan Galtung pada tulisan *Cultural Violence* terdapat adanya beberapa komponen eksploitasi pada kekerasan struktural, dalam melihat diskriminasi pengungsi di mana merasakan adanya eksploitasi pada kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Eksploitasi ini didasarkan dimana kasus yang terjadi pada masa pemerintahan Moon Jae-In yang diakui oleh menteri unifikasi dalam permintaan maaf mereka atas kelalaian survei yang kurang efektif dalam menjangkau kebutuhan hidup dan kesejahteraan pengungsi Korea Utara di negaranya, Johan Galtung memberikan pandangan bahwa suatu kekerasan Struktural merupakan aspek yang kompleks dalam melihat kekerasan tersebut (Johan Galtung 1990, 292). Melihat kasus yang terjadi pada pengungsi Korea Selatan dengan kematian yang didasarkan pada kelaparan dan minimnya materi yang didapatkan pengungsi terhadap pernyataan Johan Galtung di mana tindakan itu tergolong pada melukai kebutuhan bertahan hidup *(survival)* yang menciptakan kematian atas kelaparan dalam aspek eksploitasi A, Lalu yang diikuti pada melukai atas kesejahteraan dengan Han yang perekonomiannya tidak efektif lalu membiarkan kelompok lemah merasakan kesenjangan serta tidak efektivitasnya Kementerian Unifikasi dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga menimbulkan kematian yang menciptakan eksploitasi B atas kesengsaraannya bertahan dalam perekonomian yang tidak stabil(Johan Galtung 1990, 293).

3.2 Kekerasan Langsung Terlukanya Kebutuhan Kesejahteraan (penderitaan)

Menurut Johan Galtung pada teori segitiga kekerasan mengartikan sebuah kekerasan langsung dengan, kekerasan yang terjadi atas fisik individu tersebut dengan menyebabkan jauhnya kemampuan seseorang agar memenuhi kebutuhan dasarnya. Kekerasan ini juga menciptakan penindasan, penyerangan, yang membawa luka bahkan menyebabkan kematian (Johan Galtung 1960, 292). Dilihat dalam tipologinya berdasarkan sumber tulisan Johan Galtung Cultural Violence 1990 :

Tabel 5 : Tipologi Kekerasan Langsung

No	Kategori Kekerasan	Kebutuhan Bertahan Hidup	Kebutuhan Kesejahteraan	Kebutuhan Identitas	Kebutuhan Kemerdekaan
1.	Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Mencederai, Kesengsaraan/ derita, dan Sanksi	Desosialisasi, Resosialisasi, Warganegara kelas dua	Represi, Penahanan, Pengusiran

Sumber : (Johan Galtung 1990)

Untuk menjelaskan diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dalam melihat kekerasan langsung dan aspek terlukanya pada tipologi Johan Galtung, penulis hanya melihat diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan tercipta pada terlukanya **kebutuhan kesejahteraan** atas kesengsaraan/derita. Dalam **kebutuhan bertahan hidup** atas pembunuhan tidak digunakan karena pada diskriminasi yang terjadi dengan latar belakang pemerintahan Moon Jae-In, tidak adanya kasus pembunuhan pada pengungsi Korea Utara. **Kebutuhan kesejahteraan** dalam mencederai dan sanksi juga tidak bisa dilihat sebagai kekerasan langsung pada diskriminasi pengungsi

karena tidak ada diskriminasi hingga menyebabkan kecacatan dan sanksi. Ketiga pada **kebutuhan identitas** atas desosialisasi, resosialisasi dan warga negara kelas dua tidak digunakan. Desosialisasi tidak menjadikan diskriminasi pada pengungsi Korea Utara karena budaya antara kedua negara sama satu sama lain, pada resosialisasi dimana dasarnya hadir dan menetap warga Korea Utara di Korea Selatan atas keinginan mereka sehingga selama di Korea Selatan pengungsi tidak ada kasus pemaksaan yang terjadi atas diskriminasi pengungsi yang dilakukan pemerintah maupun warga Korea Selatan. warga kelas dua juga tidak ditemukan kasus diskriminasi atas pemaksaan untuk melakukan budaya kelompok dominan dalam kelompok masyarakat Korea Selatan maupun pemerintah atas pengungsi Korea Utara (Johan Galtung 1990, 293).

Pada kebutuhan kesejahteraan atas kesengsaraan dalam kekerasan langsung membawa kasus diskriminasi pengungsi Korea Utara masuk didalamnya. Pemerintahan Korea Selatan memberikan dukungan dalam pemukiman kembali pengungsi Korea Utara yang mencakup aspek pendidikan, keuangan, perumahan subsidi, dan pekerjaan. Tetapi permasalahan adaptasi pengungsi Korea Utara sering merujuk pada diskriminasi yang mereka terima, menurut survei 2020-2021 *Korea Hana Foundation* menunjukkan atas 13,6 % pengungsi mempunyai pengetahuan kurang yang jauh dari warga asli Korea Selatan (Himawan 2023, 63). Pada 2019 hingga 2020 menunjukkan juga bahwa pengungsi hadir di Korea Selatan diikuti dengan permasalahan diskriminasi seperti stigma sosial, dengan perilaku ini didasarkan adanya rasa superioritas sebagai warga asli Korea Selatan yang menjadi dasar diskriminasi masih terjadi. Sehingga pemerintah sebagai fasilitator untuk bisa mencegah

adanya diskriminasi tersebut pada kelompok rentan seperti pengungsi (Danu 2023, 63). Dalam mengatasi upaya permasalahan diskriminasi pengungsi Korea Utara tersebut, pemerintah membentuk kebijakan dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi dalam hal ini dilihat pada masa pemerintahan Moon Jae-In adanya rancangan baru dalam kebijakan adaptasi pengungsi di tahun 2018 hingga 2020 dimana kebijakan ini menyangkut prioritas dan tugas dalam mendorong pengungsi Korea Utara dalam memenuhi hak kesejahteraan mereka yang tinggal di Korea Selatan (Saharimiko 2021, 66-67)

Diskriminasi pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan dimana melihat kasus kematian Han Sung-Ok pada tahun 2019. Kasus ini menjadi sorotan dalam pemerintahan Moon Jae-In, hal ini karena menciptakan kemarahan pada kelompok warga Korea Utara lain yang mengkritik pemerintahan Moon dalam kematian Han dan Putranya. Dia dan putranya ditemukan meninggal dunia didalam kediamannya dengan jenazah yang membusuk, dalam identifikasi polisi Korea Selatan disimpulkan kematian Han dan putranya sudah sejak dua bulan lamanya dengan dugaan atas kelaparan (Riris Michico, 2019). Pernyataan pengungsi yang mengenali Han mengatakan Han seringkali dipermasalahkan dalam perekonomian sehingga sulitnya memenuhi kebutuhan pokok (Nathania, 2019). Hal ini diperjelas saat pedagang sayur yang sempat didatangi Han sebelum mendengar kematiannya mengatakan, pada rilisan artikel BBC Soul 22 Agustus 2019 bahwa Han sempat datang dan membeli kebutuhan pokok. Tetapi pedagang sayur sempat kesal karena Han hanya banyak memilih dan menyentuh bahan pokok tapi dia cuma membeli satu ikat sayur setelah itu bahkan itu tidak cukup untuk dia dan putranya (Laura Bicker, 2019).

Kasus ini membawa kemarahan pada kelompok pengungsi dengan mengkritik Moon Jae-In mengabaikan hak kesejahteraan warga Korea Utara karena, pernyataan pengungsi mengkritik bahwa Han sempat mengajukan tunjangan sebagai orang tua tungga kepada pemerintah di 2019 terakhir.Tetapi melihat apa yang terjadi pada kematian Han menjawab bahwa pengajuan tersebut belum dipenuhi pemerintah dengan kondisi Han yang berada pada kekurangannya untuk memenuhi kebutuhan pokok atas kematiannya. Sehingga kasus ini menciptakan aksi protes besar pengungsi Korea Utara dengan aksi teatrikal ke jalan Soul menuju Blue House dan gedung Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Edy Praman, 2019).

Johan Galtung menjelaskan pada kekerasan langsung atas terlukanya kebutuhan kesejahteraan dengan tiga komponen didalamnya yaitu mencederai,kesengsaraan/derita, dan saksi. Sesuai dengan diskriminasi yang terjadi pada pengungsi dimana kebutuhan kesejahteraan atas kesengsaraan /derita masuk didalamnya, Karena tidak terwujudnya praktik perkembangan kebijakan oleh Moon dalam melihat pengungsi Korea Utara. Yang hal ini sesuai dengan rancangan perkembangannya pada adaptasi pengungsi di 2018-2020 belum efektif sehingga menciptakan kekerasan diskriminasi pada pengungsi. Dalam hal ini juga dilihat tidak ada adanya respon atas pengajuan tunjangan sebagai orang tunggal oleh Han pada pemerintah, dimana atas pernyataan kelompok pengungsi yang mengenai Han atas keadaan situasi kemiskinan yang dialami Han dan putranya (Johan Galtung 1990, 293).

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Negara Korea Selatan merupakan negara yang maju akan modernitas yang diikuti dengan kebudayaan serta tatanan sosialnya dengan hal ini juga didasari atas adanya latar belakang ideologi yang mengelilingi masyarakat Korea Selatan. Tetapi kemajuan yang dirasakan masyarakat Korea Selatan menjadi isu yang menimbulkan aktivitas rasisme dan diskriminasi, Hal ini ditujukan pada kelompok rentan seperti pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan. Dalam laporan *Korea Hana Foundation* 2019 hingga 2020 terakhir, lebih dari 30.000 pengungsi Korea Utara menyebrangi negaranya menuju Korea Selatan, pada laporan tersebut diikuti dengan dilema diskriminasi pada pengungsi setelah menjalani pusat pelatihan dan berada pada pemukiman kembali (Suratiningsih 2023, 62-63). Adanya sikap homogenitas dari dahulu menjadikan masyarakat banyak menganggap pengungsi sebagai orang asing dengan segala prasangka buruk yang mereka miliki kepada pengungsi, sikap berbeda tersebut terutama terhadap pengungsi Korea Selatan yang tinggal dan menjadi warga negara Korea Selatan membawa pada aktivitas budaya yang biasa dilakukan masyarakat Korea Selatan dalam hal adanya penguasa dan dikuasai untuk tingkatan yang mereka ciptakan pada kelompok pengungsi Korea Utara (Shang, 2016).

Pada teorinya Johan Galtung menulis sebuah konsep yang mempengaruhi sebuah kekerasan yaitu konsep teori segitiga kekerasan. Segitiga kekerasan ini terbagi pada tingkatan yang bisa dilihat ataupun tidak terlihat yaitu kekerasan

langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural, masing-masing teori yang diberikan pada segitiga kekerasan memiliki konsep yang berbeda tetapi saling keterkaitan satu sama lain. Dalam melihat kasus diskriminasi pengungsi Korea Utara di Korea Selatan oleh kelompok masyarakat Korea Selatan dilihat pada segitiga kekerasan Johan Galtung mengungkapkan bentuk kekerasan seperti apa yang terjadi, dimana masing-masing kekerasan mempunyai komponen sendiri. Pada kekerasan langsung dalam melihat pengungsi maka di mana melihat kesenjangan fisik hingga kematian yang menimpa pengungsi sejak menjalani kehidupan di pemukiman kembali. Lalu pada kekerasan struktural membawa pada kebijakan dan program yang belum efektif dalam mengatasi diskriminasi pengungsi sebagai bagian dari kewarganegaraan untuk bisa menerima sebuah kebijakan yang memberikan pengurangan pada diskriminasi untuk pengungsi (Seo Young, 2022). Sedangkan pada kekerasan kultural membagi beberapa aspek yaitu agama dan ideologi, seni dan bahasa,ilmu pengetahuan formal,empiris dan kosmologi. Terjadinya kasus diskriminasi pada pengungsi makan dalam aspek kultural penulis membagi hanya aspek ideologi dan bahasa.

Pada kekerasan Kultural yang merangkum aspek ideologi dan bahasa, di mana sebuah kekerasan kultural merupakan kekerasan yang merangkum beberapa aspek yang menjadi timbulnya kekerasan tersebut. Pada isu diskriminasi pengungsi di mana timbulnya kekerasan pada aspek ideologi yang menjadi akar kekerasan pengungsi, Jika melihat latar belakang masing-masing ideologi yang mereka percayai dimana masyarakat Korea Selatan menjunjung tinggi ideologi demokrasi sedangkan Pengungsi sejak dulunya berasal pada ideologi komunisme, adanya perbedaan ini mewujudkan

sikap stereotip kepada pengungsi yang di mana kelompok masyarakat Korea Selatan tidak bisa menerima seseorang yang berasal dari ideologi yang berbeda ditambah dengan adanya budaya prasangka buruk yang sudah ditanamkan sedari dulu menangani komunisme Korea Utara sehingga diskriminasi sangat sering hadir ditengah-tengah sosial pengungsi Korea Utara. Pada aspek bahasa di mana kemajuan dan modernisasi negara Korea Selatan sangat mengubah seluruh nilai dan aspek tatanan di negara tersebut. Seperti dalam hal bahasa yang sangat mengubah seluruh tatanan bahasa dalam mengikuti perkembangan budaya, Tatanan bahasa yang dimiliki masyarakat Korea Selatan lebih mengikuti karakteristik Barat dan hal ini menjadi bagian dari perubahan bahasa yang dianut Korea Selatan. Aksen yang dimiliki antara Korea Selatan dan Korea Utara berbeda sehingga hal ini menjadi dilema kepada pengungsi dalam berkomunikasi secara sosial, selain hambatan bahasa yang dimiliki ketakutan akan prasangka buruk atas identitas mereka menjadikan pengungsi lebih banyak menghindari aktivitas sosial dan terhambat dalam dunia pekerjaan mereka.

Pada kekerasan struktural di mana menurut Johan Galtung kekerasan struktural merupakan kekerasan yang paling kompleks dan tidak bisa diidentifikasi secara langsung dimana didalamnya lebih membawa aktor sebagai pemegang kuasa dan menghasilkan kelompok yang tereksploitasi pada kekuasaan atau kebijakan yang diberikan suatu tatanan negara. Pengungsi Korea Utara memang banyak memiliki program bantuan oleh pemerintah Korea Selatan di mana bantuan-bantuan tersebut untuk memenuhi kewajiban yang tertera pada kebijakan perlindungan pengungsi Korea Utara. Diluar dari hal tersebut pengungsi masih didiskriminasi secara sosial, sehingga kebijakan

pemerintah akan kasus diskriminasi tersebut seringkali ditanyakan pada kelompok migran seperti pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan, Sebuah isu diskriminasi menjadi masalah yang sering dialami Korea Selatan dan menciptakan perwujudan keinginan atas kepedulian pemerintah atas pemenuhan kebutuhan pengungsi. Hal ini membawa tipologi kekerasan Johan Galtung pada kekerasan struktural menjadi keterkaitan pada kasus yang terjadi terhadap pengungsi dan bahkan mengaitkannya pada tipologi kekerasan langsung.

Pada kekerasan Langsung yang di mana menurut Johan Galtung sebuah kekerasan langsung merupakan kekerasan yang mudah untuk diidentifikasi karena adanya pelaku dan korban yang menciptakan kekerasan fisik,penganiayaan serta kematian. Pada kasus pengungsi dalam dilemanya setelah menjalani program pusat pelatihan mengharuskan pengungsi untuk kembali pada tempat tinggal pemukiman kembali, tetapi dalam adaptasinya secara sosial pengungsi banyak mengalami hambatan dalam hal bahasa dan prasangka buruk yang mereka alami. Terlihat pada kasus yang terjadi pada pengungsi Korea Utara yang ditemukan tewas di kediamannya pada pemukiman kembali, kematian tersebut didasarkan pada kelaparan pengungsi dan hal ini karena ketakutan yang diterima pengungsi atas prasangka buruk yang diberikan pada kelompok masyarakat Korea Selatan yang menciptakan pengungsi lebih memilih mengisolasikan diri untuk menghindari diskriminasi tersebut hingga menyebabkan mereka kelaparan secara berkala. Sehingga dalam tipologi kekerasanya sebuah kekerasan struktural dan langsung bisa menjadi saling keterkaitan pada sebuah fenomena yang terjadi yang dimana disini adanya kekerasan yang dirasakan pengungsi hingga menimbulkan

kematian. Pada analisis bentuk kekerasan pada pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dalam segitiga kekerasan Johan Galtung menjadi relevan dengan melihat masing-masing bentuk diskriminasi yang dialami pengungsi. Sikap yang didasari sejak kecil hingga mengakar sampai sekarang menjadi budaya masyarakat Korea Selatan dalam melihat pengungsi sebagai kelompok asing yang bukan bagian dari mereka. Kekerasan yang dialami pengungsi pada penelitian diidentifikasi pada tahun 2019-2020 masa pemerintahan Moon Jae-In menimbulkan isu atas pengungsi. Melihat pada sikap pemerintah dalam diskriminasi yang dialami pengungsi baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat.

Gambar 2 : Hasil Analisis Bentuk Segitiga Kekerasan Galtung



sebuah penguraian pada gambar 2 diatas memberi jenis komponen dan aspek kekerasan pada pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan teranalisis menurut tipologi kekerasan oleh Johan Galtung, Yang membawa kekerasan langsung,struktural dan kultural saling berhubungan pada setiap aspek tipologinya atas kasus yang dibawa pada penelitian yaitu diskriminasi pengungsi.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini penulis merangkum pada konsep teori segitiga kekerasan Johan Galtung yang merangkum Kekerasan langsung,struktural dan kekerasan kultural. Pada kekerasan kultural penulis hanya melihat aspek ideologi dan bahasa sebagai akar pada kekerasan kultural terjadi. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis, maka penelitian ini masih mempunyai kekurangan dan keterbatasan yang masih jauh dari kata sempurna sebagai satu penelitian. Namun, sebuah penelitian ini menjadi penting karena penulis ingin memberikan motivasi dan berharap dapat menjadikan penelitian lain agar menciptakan penelitian lanjutan atas isu diskriminasi kekerasan pada pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan yang lebih kompleks, dengan menggunakan metode dan teori yang relevan seperti segitiga kekerasan Johan Galtung dan mengambil fokus yang secara luas dari penelitian ini. Karena setiap periodenya akan ada isu dan fenomena yang berbeda pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya bisa menciptakan penelitian yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Cho, Seo Y. 2021. "The effect of social identity on integration of social minorities: The case of North Korean refugees in South Korea." *Sage Journals* 25, no. 1 (Desember): 3-20. https://doi.org/10.1177/22338659211052268.

Anindita, Vinesha. 2020. "Gelombang Pengungsi Korea Utara di Korea Selatan: Politik Domestik, Integrasi, dan Permasalahan Sosial." *Jurnal Hubungan Internasional*, no. 2 (Juli - Desember), 279 - 294.

Tanuwijaya, Patricia. 2023. "Analisis Pelanggaran HAM Yang Terjadi Di Korea Utara." *Kajian Kontemporers Hukum dan Masyarakat*, (Mei), 1 - 21.

Tanuwijaya, Patricia, Dean Trianata, and Yosua Hasiholan. "Analisis Pelanggaran HAM di Korea Utara." Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 1,* no.

01 (2022).

Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum Universita Katolik Parahyangan Bandung, and Universita Kristen Maranatha Bandung. 2022. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?* 19 (juni): 275.

Choi, Gyubin. 2018. "North Korean Refugees in South Korea: Change and Challenge in Settlement Support Policy." *The Korean Journal of International Studies* 16, no. 1 (April): 77 - 98.

Manan, Bagir, and Susi D. Harijanti. 2016. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia." *Ilmu Hukum* 3, no. 3 (Agustus): 448 - 467.

Indonesia, CNN. 2022. "Penyebab Pembelot dari Korut Tetap Hidup Susah di Korsel Baca artikel CNN Indonesia "Penyebab Pembelot dari Korut Tetap Hidup Susah di Korsel" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220111122531-113-745128/penyebab-pembelot-dar." *CNN Indonesia Internasional*, Januari 12, 2022.

Johan Galtung. 2013. "Cultural Violence." *Journal OPeach Research* 27 (07): 291-305.

Hadzanisya, Hani, and Febriani E. Trihtarani, S.S., M.A. 2020. "Sikap Individualisme dan Diskriminatif Masyarakat Korea Selatan dalam Film A Man Who Was Superman: Kajian Sosiologi Sastra." *Universitas Gadjah Mada*.

Strother, Jason. 2013. "Menjembatani Kesenjangan Antara Korea Selatan dan Utara." *KBR Indonesia*, Agustus 13, 2013.

Gyubin Choi. 2018. *North Korean Refugees in South Korea: Change and Challenge in Settlement Support Policy* 16 (april): 77-98.

Pratiwi, Endang. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Juni): 270 - 293.

Widiyastono, Muhammad H. 2021. "Utilitarianisme dalam Praktik Kehidupan Prososial Manusia." *: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Publisher* 1, no. 1 (Juli): 19 - 26.

Antara News. 2011. "Pengungsi Korea Utara luncurkan partai politik di Korea Selatan." (02).

Universitas Indonesia and Ali Muhyidin. 2021. *Faktor-Faktor Ambisi Politik Imigran Korea Utara di Korea Selatan (Studi Kasus: Keterlibatan Thae Yong-Ho dan*

Ji Seong-Ho sebagai Kandidat dalam Kontestasi Pemilu Legislatif di Korea Selatan Tahun 2020), (06).

BBC. 2021. “Apa yang terjadi ketika pembelot Korut tiba di Korsel?” February 17, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56093415.

hoon, Yoon H. 2019. Debat hak asasi manusia Korea Utara yang diadakan di Washington, D.C.: "Pemerintahan Moon harus menjamin aktivitas kelompok pembelot Korea Utara". https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/03/2019050300796.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news.

Radar Jember. 2019. “Han Sung-ok, Pembelot Korut yang Meninggal di Tanah Harapan.” (September). https://radarjember.jawapos.com/internasional/791096198/han-sungok-pembelot-korut-ya

ng-meninggal-di-tanah-harapan.

Adisya, and Elma. 2020. *Hiw South Korea's Religious Fundamentalists Influence Its Politics*. N.p.: Magdalene.

BBC. 2018. “Mantan mata-mata Korut ingin pulang ke kampung halamannya.” June 6, 2018. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-44379964.

Bofa, Maya I. 2019. *KEBIJAKAN PEMERINTAH KOREA SELATAN TERHADAP DEFECTOR KOREA UTARA (2013-2017)* 01. https://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Sovereign/article/view/2196.

Cho, Ellen, and Eva R. Richards. 2023. “Why South Korea Can't Pass Anti-discrimination Laws.” *Asialink*, October 20, 2023. https://asialink.unimelb.edu.au/insights/why-south-korea-cant-pass-anti-discrimination-laws.

Chung, and Edward YJ. 2015. *Korean Confucianism: Tradition and Modernity. Korea*. N.p.: The Academy of Korea Studies Press.

Eschborn Ines Apel,B.A., Dr N. 2014. *North Korean Refugees in South Korea Arduous Escape and Difficult Integration*, (10), 292. https://www.files.ethz.ch/isn/184307/292_Eschborn_Apel%20(2).pdf.

INDONESIAN, KBS W. 2020. *Komisi HAM Nasional Korsel Desak Pembuatan UU Anti Diskriminasi*, 06 30, 2020. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=59327.

International Crisis Group. 2011. *Orang Asing di Rumah: Orang Korea Utara di Selatan*, 7 14, 2011.

https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/korean-peninsula/strangers-home-north-koreans-south.

The Korean Journal Of International Studies. 2018. *North Korean Refugees in South Korea: Change and Challenge in Settlement Support Policy* 16 (04): 77-98. https://www.kjis.org/journal/download_pdf.php?doi=10.14731/kjis.2018.04.16.1.77.

Maharani, and Anggih. n.d. *"MENINJAU KEBERHASILAN MOON JAEIN SEBAGAI PRESIDEN KOREA."* 15.

“Policy on North Korean Defectors< Data & Statistics< South-North Relations.” n.d. 통일부. https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/defectors/#none.

"Republic of Korea: Protection of Defecting North Korean Residents and Support of Their Settlement Act, 1997." 1997. Refworld. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1997/en/14959.
"Resettling in South Korea: Challenges for Young North Korean Refugees." n.d. The Asan Institute for Policy Studies. https://en.asaninst.org/contents/resettling-in-south-korea-challenges-for-young-north-korean-refugees/.
Setiawati, Veronica S., Fransisca T. Adji, and Susilawati E. Peni Adji. 2022. *Kekerasan dalam Novel Dari Dalam Kubur Karya Soe Tjen Marching: Perspektif Johan Galtung* 3 (12): 171-179. https://people.usd.ac.id/~dosen/repository/tjandra/kekerasan.pdf.
"SOUTH KOREA: 'North Korean defectors and activists face increasing pressure to stay silent.'" 2020. Civicus. https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4731-south-korea-north-korean-defectors-and-activists-face-increasing-pressure-to-stay-silent.
Universitas Sogang and Universitas Kookmin. 2016. "Identitas nasional di negara yang terpecah belah: Sikap warga Korea Selatan terhadap pembelot Korea Utara dan penyatuan kembali dua Korea." (November). 10.1016/j.ijintrel.2016.10.003.
University of Music and Performing Arts Vienna. 2022. "The effect of social identity on integration of social minorities: The case of North Korean refugees in South Korea." 25:3-20. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/22338659211052268.
detikNews. 2023. "Cerita 3 Perempuan Pembelot Korut Mulai Hidup Baru di Korsel." July 12, 2023. https://news.detik.com/bbc-world/d-6818430/cerita-3-perempuan-pembelot-korut-mulai-hidup-baru-di-korsel.
Evans, Stephen. 2015. "Korea's hidden problem: Suicidal defectors." *BBC*, November 5, 2015. https://www.bbc.com/news/magazine-34710403.
Hankyoreh. 2022. "[Editorial] Has South Korea's Unification Ministry forgotten its purpose?" *Hankyoreh*, 07 20, 2022.
Hasan, Rizki A. 2019. "Korsel Deportasi 2 Nelayan Korut yang Bunuh 16 Rekannya di Kapal." *Liputan 6*, November 8, 2019.
Intisari Online. 2021. "Terpukau 'Rumput' Korea Selatan yang Terlihat Lebih Hijau, Pembelot Korea Utara Malah Alami Trauma Ekstrem Hingga Ingin Habisi Nyawa Sendiri Setelah Berhasil Kabur - Semua Halaman - Intisari." March 12, 2021. https://intisari.grid.id/read/032598694/terpukau-rumput-korea-selatan-yang-terlihat-lebih-hijau-pembelot-korea-utara-malah-alami-trauma-ekstrem-hingga-ingin-habisi-nyawa-sendiri-setelah-berhasil-kabur?page=all.
Kuhn, Anthony. 2019. "In South Korea, Anguish Over Deaths Of North Korean Defectors Who May Have Starved." *NPR*, September 17, 2019. https://www.npr.org/2019/09/17/761156048/in-south-korea-anguish-over-deaths-of-north-korean-defectors-who-may-have-starve.
Ryall, Julian. 2021. "North Korean defectors struggle with life in the South – DW – 10/24/2021." DW.

https://www.dw.com/en/north-korean-defectors-struggle-adapting-to-life-in-the-south/a-59548526.

Shin, Kwang. 2017. "The trajectory of anti-communism in South Korea - Asian Journal of German and European Studies." *Asian Journal of German and European Studies*, February 2, 2017. https://ajges.springeropen.com/articles/10.1186/s40856-017-0015-4.

Shin, Kwang Y. 2017. "Lintasan anti-komunisme di Korea Selatan." *Springer Open*, (Februari). https://ajges.springeropen.com/articles/10.1186/s40856-017-0015-4.

Tribun Bali. 2021. "Suka Duka Gadis Pembelot Korea Utara, Harus Belajar Pakai Ponsel dan ATM Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Suka Duka Gadis Pembelot Korea Utara, Harus Belajar Pakai Ponsel dan ATM, https://bali.tribunnews.com/2021/03/12/suka-duka." Maret 12, 2021.